

USULAN PROPOSAL PENELITIAN



Judul Penelitian:

**DAMPAK DBH, DAU, DAK, TERHADAP EKONOMI DAERAH
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAMBI**

Dibiayai oleh:

Dipa Universitas Muhammadiyah Jambi Tahun Anggaran 2022/2023

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAMBI TAHUN 2022

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengembangan ekonomi daerah sangat tergantung pada sumber pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah tersebut dapat bersumber dari pendapatan asli daerah, dana transfer dan sumber pendapatan lainnya yang sah. Dana transfer dapat berupa dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dana insentif daerah dan dana untuk otonomi khusus dan istimewa. Kontribusi dana transfer atau dikenal juga dengan dana perimbangan sangat besar terhadap sumber pembiayaan daerah karena pendapatan asli daerah masih kecil kontribusinya. Seharusnya untuk melaksanakan otonomi daerah pendapatan asli daerah harus berkontribusi minimal 25 persen terhadap pendapatan daerah. Kenyataannya pendapatan asli daerah mayoritas masih di bawah 10 persen, akibatnya peran dan kontribusi dana transfer yang berupa DBH, DAU dan DAK tersebut sangat besar terhadap penerimaan daerah.

Dana transfer atau dana perimbangan yang merupakan DBH, DAU dan DAK punya fungsi dan peran yang berbeda. DAU lebih difokuskan untuk pembiayaan ASN (Aparatur Sipil Negara) sedangkan dana alokasi khusus lebih fokus membiayai pembangunan infrastruktur daerah. Sedangkan DBH diberikan kewenangan daerah untuk menggunakannya. Secara sutansi DAK lebih besar perannya dalam menumbuhkembangkan ekonomi daerah karena menyangkut tentang pembangunan infrastruktur daerah yang mendorong tumbuh kembangnya ekonomi daerah terutama infrastruktur fisik ekonomi daerah.

Untuk melihat dampak dana perimbangan/transfer pada kabupaten/kota di provinsi Jambi maka diperlukan analisis yang tajam terhadap penggunaan dana tersebut yang berdampak bagi tumbuh kembangnya ekonomi kabupaten/kota di provinsi Jambi. Data tahun 2021 memperlihatkan jumlah dana yang ditransfer dan diperoleh kabupaten/kota di provinsi Jambi berupa DBH Rp. 89,54 milyar, DAU Rp. 574, 53 milyar dan DAK Rp. 189,36 milyar. Sedangkan dipihak lain rata-rata pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota selama tahun 2021 3.58 persen. Oleh karena itu perlu dilakukan analisis bagaimana dampak dana transfer tersebut terhadap ekonomi daerah kabupaten/kota dan strategi peningkatannya.

1.2. Perumusan Masalah

Sesuai dengan deskripsi yang di muat dalam latar belakang maka dirumuskan pointer permasalahan adalah

1. Bagaimanakah dampak DBH, DAU, DAK terhadap ekonomi daerah kabupaten/kota di Provinsi Jambi
2. Strategi apakah yang harus dilakukan untuk meningkatkan dampak DBH, DAU, DAK terhadap ekonomi daerah kabupaten/kota di Provinsi Jambi

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah

1. Untuk menganalisis dampak DBH, DAU, DAK terhadap ekonomi daerah kabupaten/kota di Provinsi Jambi
2. Untuk merumuskan strategi yang harus dilakukan untuk meningkatkan dampak DBH, DAU, DAK terhadap ekonomi daerah kabupaten/kota di Provinsi Jambi

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat akademis : menumbuhkembangkan ilmu keuangan daerah
2. Manfaak Praktisi : Masukan bagi pemerintah kabupaten/kota untuk merumuskan kebijakan dalam meningkatkan dampak DBH, DAU, DAK terhadap ekonomi daerah.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kajian Teori

2.1.1. Perekonomian Daerah

Perekonomian Daerah diartikan sebagai upaya pemerintah dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dengan memanfaatkan potensi sumber daya daerah dimulai dari proses produksi, distribusi dan konsumsi yang tujuannya untuk meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat. Bentuk ekonomi daerah dapat dilihat dengan memakai PDRB sebagai indikatornya.

2.1.2. Keuangan Daerah

Rencana kerja pemerintah daerah yang diwujudkan berupa uang (rupiah) pada satuan waktu tertentu merupakan bentuk dari keuangan atau anggaran daerah. Alat kebijakan utama yang digunakan oleh pemerintah daerah adalah anggaran daerah yang dituangkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Mardiasmo, 2021). Makna lain keuangan daerah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah seluruh hak dan kewajiban daerah untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahan daerah dalam bentuk nilai uang dan semua bentuk kekayaan milik daerah, sehingga dapat dikatakan bahwa keuangan daerah merupakan bentuk hak dan kewajiban pemerintah daerah yang disusun dalam uang (Rupiah) yang tujuannya adalah untuk melaksanakan pembiayaan kegiatan pemerintah daerah.

2.1.3. Dana Perimbangan

Dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, terutama dalam peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Pada umumnya, dana perimbangan merupakan sumber dana terbesar dalam pembiayaan kegiatan pemerintah daerah. Tujuan utama dari pemberian dana perimbangan adalah untuk mengatasi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Kesenjangan fiskal antar pemerintah daerah, perbaikan sistem perpajakan, dan koreksi ketidakefisienan fiskal.

2.1.4. Dana Alokasi Umum

Berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2004 Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah untuk membiayai pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum ini bersifat Block Grant yang berarti penggunaan dari dana ini diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang bertujuan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah (Rasu; et al., 2019).

$$\text{DAU} = \text{Alokasi Dasar (AD)} + \text{Celah Fiskal (CF)}$$

Keterangan

AD = Gaji PNS Daerah

CF = Kebutuhan Fiskal – kapasitas Fiskal

2.1.5. Dana Alokasi Khusus

Perundangan yang mengatur Dana Alokasi Khusus adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 pasal 39, pasal 40 dan pasal 41. Dana alokasi khusus berasal dari APBN dan dialokasikan ke kabupaten/kota bertujuan untuk membiayai kebutuhan tertentu yang sifatnya khusus, tergantung pada tersedianya dana dalam APBN. Kebutuhan khusus yang dimaksud adalah kebutuhan yang sulit diperkirakan dengan rumus alokasi umum, dan/atau kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional (Handayani & Nuraina, 2012)

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang komprehensif tentang dampak DBH, DAU dan DAK Kabupaten/Kota di provinsi Jambi diantaranya adalah :

1. Budiyanto, S (2022) meneliti variabel Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2019. Data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa gabungan data deret waktu (time series) 5 tahun dan data antarseksi (cross section) 35 kabupaten/kota yang berasal dari publikasi Badan Pusat Statistika dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan selama periode 2015-2019. Penelitian ini menggunakan alat analisis regresi data panel dengan metode pendekatan

OLS (Ordinary Least Square) melalui Fixed Effect Model. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel independen Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif, sedangkan untuk variabel Dana Bagi Hasil berpengaruh negatif terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2019

2. Sari, D.A., dkk (2022) mengkaji pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011-2020. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan data panel cross section 5 kabupaten/kota. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Produk Domestik Regional Bruto, Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Produk Domestik Regional Bruto, Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Produk Domestik Regional Bruto, Dana Bagi Hasil Dana tidak berpengaruh terhadap Produk Domestik Regional Bruto.
3. Penelitian Azizi, M (2018) meneliti Dampak Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Ketimpangan Produk Domestik Regional Bruto Di Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2006-2014 menggunakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi selatan, variabel PDRB, DAU, DAK, dan DBH Provinsi Sulawesi selatan tahun 2005-2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan regional Sulawesi Selatan pada tahun 2005 - 2014, sedangkan variabel dana alokasi khusus berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan regional Sulawesi Selatan pada tahun 2005 s/d 2014 dan variabel
4. Asman. M (2022), meneliti Analisis Pengelolaan Penerimaan Pajak Daerah Untuk Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, menggunakan analisis model Dapel Indept untuk menentukan strategi pengelolaan untuk peningkatan penerimaan pajak pada kabupaten/kota di provinsi Jambi

2.3. Karangka Pikir

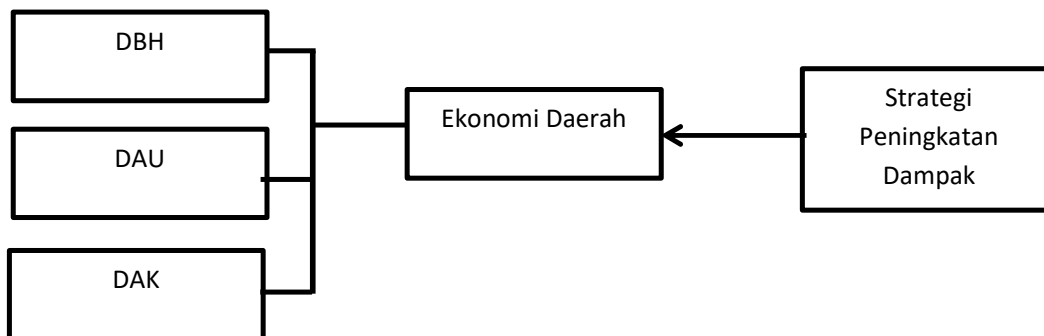
Pemerintah daerah dalam menjalankan kegiatannya membutuhkan pendapatan daerah untuk dapat melaksanakan tugas-tugas yang diemban oleh daerah. Semakin tinggi kemampuan daerah untuk mencukupi biaya kebutuhan daerah bergantung pada banyaknya pendapatan yang dihasilkan oleh daerah sehingga akan mampu memenuhi kebutuhan

masyarakat. Pertumbuhan ekonomi daerah dapat dimungkinkan dari alokasi DAU, DAK, dan DBH yang dikelola dengan baik dan tepat yang nantinya akan memberikan dampak bagi kesejahteraan masyarakat. Upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan pelayanan publik yang berkualitas dapat diwujudkan dengan penerapan belanja daerah yang ditujukan pada kegiatan pembangunan yang memiliki hubungan erat dengan kebutuhan masyarakat. Upaya ini pada akhirnya diharapkan dapat memberikan dampak berupa pelayanan kepada masyarakat yang lebih berkualitas dan berlanjut pada peningkatan kemakmuran pada masyarakat.

Kurangnya kemampuan dari daerah dalam menyediakan dana untuk pembangunan daerah menyebabkan tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat tinggi. Bahkan dana transfer dari pemerintah lebih dominan dibandingkan penerimaan daerahnya sendiri. Kebijakan desentralisasi fiskal muncul akibat tingginya tingkat ketergantungan daerah yaitu merupakan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan memberikan dana kepada daerah. Wujud dari pemberian pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam bentuk dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) yang dialokasikan kepada pemerintah daerah.

Staregi yang dipilih adalah dengan melakukan identifikasi dan analisis Data Panel Indep (Dapel Indept) yang disusun dan dirumuskan berdasarkan hasil olahan data penel atas alokasi DBH, DAU dan DAK untuk peningkatan ekonomi daerah pada kabupaen/kota di provinsi Jambi. Gambaran alur pikir penelitian ini dapat dilihat pada skema dibawah ini

Gambar 3.1. Skema Kerangka Pikir



1.4. Hipotesis

Berdasarkan perumusan masalah dan kerangka pemikiran maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah Diduga terdapat DBH, DAU dan DAK memberikan dampak yang signifikan terhadap ekonomi daerah kabupate/kota di Provinsi Jambi.

BAB III. METODE DAN TEKNIK PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah Analisis Data Sekunder dan obeservasi. Yang dimaksud dengan metode penelitian Analisis Data Sekunder adalah suatu metode dengan memanfaatkan data sekunder sebagai sumber data utama. Memanfaatkan data sekunder yang dimaksud yaitu dengan menggunakan sebuah teknik uji statistik yang sesuai untuk mendapatkan informasi yang diinginkan yang bersumber dari instansi terkait.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder *Time Series* dan *Cross Section* 11 kabupaten/kota di provinsi Jambi tahun 2017-2021. Sumber memperoleh data tersebut adalah BPS Provinsi Jambi, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan

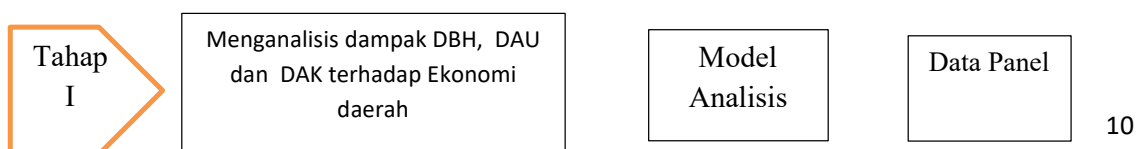
3.3 Tahapan Penelitian

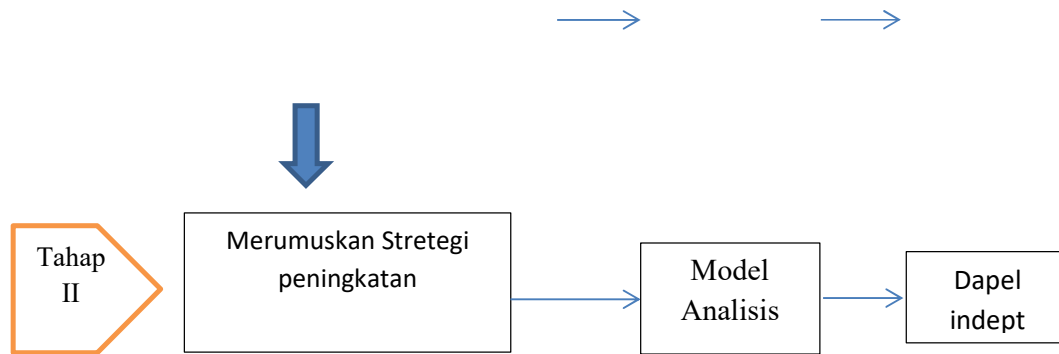
Penelitian dampak DBH, DAU dan DAK terhadap ekonomi daerah kabupaten/Kota di provinsi Jambi akan dilakukan selama 7 (tujuh) bulan dengan 2 kategori tahapan kegiatan. Kedua kategori tersebut adalah:

1. Menganalisis dampak DBH, DAU dan DAK terhadap ekonomi daerah kabupaten/Kota di provinsi Jambi
2. Merumuskan strategi peningkatan dampak DBH, DAU dan DAK terhadap ekonomi daerah kabupaten/Kota di provinsi Jambi

Hubungan setiap tahapan kegiatan dengan keluaran akan tergambar dalam Bagan Penelitian secara keseluruhan. Bagan alur tersebut disajikan pada gambar berikut ini:

Gambar 3.1. Bagan Penelitian





3.5. Model Analisis Data

3.5.1. Model Analisis Pertama

Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel untuk mengetahui hubungan antara variable dependen dan variable independen. Bentuk persamaan regresi data panel adalah:

$$PDRBit = \beta_0 + \beta_1 DBHit + \beta_2 DAUit + \beta_3 DAKit + \mu it$$

Dimana :

PDRBit = PDRB kabupaten/kota di provinsi Jambi

DBHit = Dana Bagi hasil kabupaten/kota di provinsi Jambi

DAUit = Dana Bagi hasil kabupaten/kota di provinsi Jambi

DAKit = Dana Bagi hasil kabupaten/kota di provinsi Jambi

μit = error term

β_0 = Koefisien regresi

β_1 = koefisien regresi DBH kabupaten/kota di provinsi Jambi

β_2 = koefisien regresi DAU kabupaten/kota di provinsi Jambi

β_3 = koefisien regresi DAK kabupaten/kota di provinsi Jambi

Uji Pemilihan Model

Pemilihan model regresi bertujuan untuk menentukan model yang paling tepat untuk digunakan dalam mengolah data panel. Beberapa pengujian yang dilakukan yaitu Uji Chow, Uji Hausman, Uji Lagrange Multiplier.

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik pada penelitian ini meliputi 4 uji yaitu: uji normalitas, uji multi kolinieritas, uji heteroskedastisitas dan uji auto korelasi.

Uji Hipotesis

1. Uji t

Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan

- a. Jika nilai koefisien variabel independen positif dan nilai $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ maka H_0 ditolak.
- b. Jika nilai koefisien variabel negatif dan $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$ maka H_0 diterima.

2. Uji F

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel dependen

- a. $F\text{-hitung} < F\text{ tabel}$ artinya menerima H_0 .
- b. $F\text{-hitung} > F\text{ tabel}$ artinya menolak H_0 .

3. Koefisien Determinan

Koefisien determinan digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen

3.5.2. Model Analisis Kedua

Untuk menjawab tujuan penelitian yang kedua, yakni merumuskan strategi dampak DBH, DAU dan DAK untuk peningkatan ekonomi daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jambi digunakan analisis data panel indept (dapel indept). Model dipilih untuk merumuskan strategi yang berfokus pada hasil olahan data panel berupa regresi berganda data panel dan indept (pendalaman) terhadap variabel utama yang signifikan dan pengaruhnya terhadap ekonomi daerah. Model ini merupakan tindak lanjut dari hasil olahan regresi data panel yang variabelnya terdiri dari tingkat signifikansi hingga akan diperoleh variabel terpilih prioritas I,

II, III dan IV dan selanjutnya didalami oleh peneliti dan *stakeholder* (pemangku kepentingan). Dan untuk memudahkan perumusan strategi tersebut digunakan tabel sebagai alat bantu sebagai berikut :

Tabel. Perumusan Strategi Data Panel - Indept

No	Hasil Olahan Data Panel Berdasarkan Skala Prioritas	Pendalaman	Strategi peningkatan terpilih
	Proritas I	P1.1	SP.T1
	Proritas II	P2.1	SP.T2
	Proritas III	P3.1	SP.T3
	Proritas IV	P4.1	SP.T4

Untuk merumuskan strategi melalui indept maka dapat dilakukan pula pendalaman terhadap kondisi internal dan eksternal yang akan menjadi strategi kunci seperti sajian tabel dibawah ini.

Tabel.. Perumusan Strategi Kunci Melalui Indept

NO	Strategi peningkatan terpilih	Analisis kondisi		Strategi kunci
		Internal	ekseternal	
1	SP.T1	KI.1	KE.1	SK.1
2	SP.T2	KI.2	KE.2	SK.2
3	SP.T3	KI.3	KE.3	SK.3
4	SP.T4	KI.4	KE.4	SK.4

BAB 5. JADWAL DAN ANGGARAN PENELITIAN

Penelitian tentang dampak DBH, DAU dan DAK terhadap ekonomi daerah, direncanakan memerlukan waktu 7 bulan. Deskripsi alokasi waktu untuk penelitian tersebut dimuat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.1 Alokasi Waktu Penelitian

No	Jenis Kegiatan	1	2	3	4	5	6	7
1	Penyusunan proposal							
2	Pengumpulan data sekunder							
3	Pengolahan dan analisis data							
4	Penyusunan laporan							
5	Seminar dan publikasi hasil penelitian							

Dalam penelitian ini rencana anggaran biaya yang dibutuhkan adalah 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Rencana penggunaan anggaran biaya tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5. 2. Rincian Anggaran Biaya Penelitian

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Gaji dan Upah	1.000.000
2	Bahan/ Perangkat Penunjang/ Peralatan/laporan/publikasi	500.000,-
3	Perjalanan	500.000,-
4	sewa peralatan/mesin/peralatan penunjang penelitian	500.000,-
	JUMLAH	2.500.000,-

DAFTAR PUSTAKA

- Asman, M. (2022). Analisis Pengelolaan Penerimaan Pajak Daerah Untuk Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Disertasi. Universitas Muhammadiyah Jambi.
- Azizi, M. (2018). The Implication Of General Allocation Fund, Special Allocation Fund, Profit Sharing Fund To Inequality The Gross Regional Domestic Product In South Sulawesi Province Period 2006-2014. *Tasharruf: Journal Economics and Business of Islam*, 3(1).
- Budiyarto, S. (2022). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2019* (Doctoral dissertation, UPN"Veteran" Yogyakarta).
- Handayani, D., & Nuraina, E. (2012). Pengaruh pajak daerah dan dana alokasi khusus terhadap alokasi belanja daerah kabupaten madiun. 1(32), 1–12.
- Mardiasmo, (2021). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Penerbit Andi
- Sari, D. A., Sodik, J., & Rahayu, A. (2022). Determinan Produk Domestik Regional Bruto Antar Kabupaten/Kota Di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011-2020. *SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi dan Akuntansi*, 1(4)
- Rasu, K. J. E., Kumenaung, ; Anderson G., & Koleangan, ; Rosalina A.M. (2019). Analisis Pengaruh Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kota Manado. 20(4), 12–25.